

**KAJIAN IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PADA PENGGUNAAN LAHAN PERMUKIMAN
KOTA SALATIGA TAHUN 2010 DAN 2017**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Geografi Fakultas Geografi**

oleh:

PRADANA NURFIANI
E100150204

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2010-2030 PADA PENGGUNAAN
LAHAN PERMUKIMAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

PRADANA NURFANI
E100150204

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen
Pembimbing**



Drs. Priyono, M.Si



HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2010-2030 PADA PENGGUNAAN
LAHAN PERMUKIMAN KOTA SALATIGA TAHUN 2017

OLEH
PRADANA NURFIANI
NIM : E100150204

Telah dipertahankan didepan tim penguji
Fakultas Geografi
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada:
Hari, Tanggal: Kamis, 31 Oktober 2019
Dan telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Priyono, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Choirul Amin, S.Si. MM.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Umrotun, M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

(.....)

(.....)



Dekan Fakultas Geografi


Dr. Yuli Priyana, M.Si

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 oktober 2019

Penulis



Pradana Nurfitri

**KAJIAN IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PADA
PENGUNAAN LAHAN PERMUKIMAN
KOTA SALATIGA TAHUN 2010 DAN 2017**

Abstrak

Kota Salatiga merupakan kota yang perkembangannya cukup pesat, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan ruang yang disebabkan karena aktivitas sumberdaya manusia. Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting terhadap rencana tata ruang kota. Penelitian ini dikhususkan pada penggunaan lahan permukiman karena sejak ditetapkan RTRW tahun 2010-2030, perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada penggunaan lahan permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi RTRW pada penggunaan lahan permukiman tahun 2017, mengkaji persebaran penyimpangannya dan mengetahui karakteristik pelaku penyimpang serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan RTRW. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survey lapangan dengan melakukan wawancara dan koesioner. Penggunaan lahan eksisting 2017 diperoleh dari interpretasi citra satelit yang kemudian dilakukan cek lapangan. Untuk mengetahui implementasi RTRW pada penggunaan lahan permukiman dan persebaran penyimpangannya menggunakan bantuan SIG dengan metode overlay (tumpang-susun) yang kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif dan pendekatan keruangan dengan pola keruangan. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan penggunaan lahan permukiman digunakan wawancara dengan dinas tata ruang Kota Salatiga. Koesioner digunakan untuk mengetahui karakteristik pelaku penyimpang. Persebaran Koesioner dilakukan dilokasi terjadinya penyimpangan dengan pengambilan sample secara *random sampling* sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan 1). implementasi rencana tata ruang wilayah Tahun 2017 tingkat kesesuaiannya 55,1%, permukiman yang menyimpang RTRW 4,2% dan sisanya 40,7% merupakan wilayah yang peruntukannya untuk permukiman yang eksistingnya belum terealisasi menjadi permukiman. Secara umum penggunaan lahan permukiman belum melampaui luas yang ditetapkan oleh RTRW Kota Salatiga. 2). Persebaran penyimpangan permukiman terhadap tata ruang tersebar diseluruh kecamatan. Luas penyimpangan pada tahun 2017 sebesar 123,4 Ha atau 4,2%. Wilayah peruntukan yang paling banyak menyimpang yaitu Kawasan sempadan sungai. 3). Karakteristik pelaku penyimpang permukiman terhadap RTRW Kota Salatiga adalah: kondisi sosial ekonomi masyarakat dilokasi penyimpangan menunjukkan tingkat pendapatan rendah dengan jenis pekerjaan didominasi oleh pedagang, pengangguran dan ibu rumah tangga, pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap RTRW masih rendah sehingga mempengaruhi terjadinya penyimpangan. 4). Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil wawancara dengan dinas tata ruang bahwa penggunaan lahan masih ditentukan dengan keinginan responden sebagai

pemilik lahan, kurang koordinasi dengan lembaga lain, kurang maksimal dalam penegakan sanksi dan kurang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan RTRW.

Kata kunci: Implementasi, Penyimpangan Penggunaan Lahan, Permukiman, Rencana Tata Ruang Wilayah

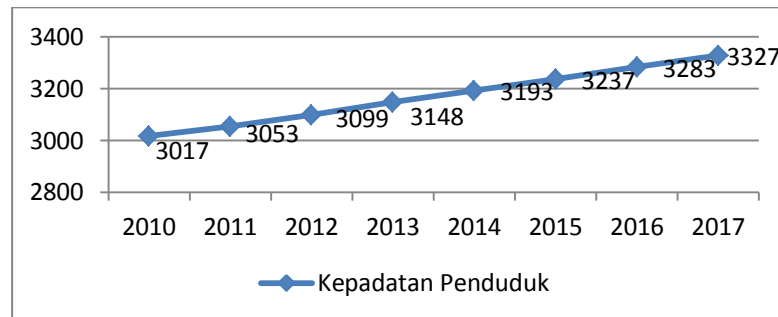
Abstract

Salatiga City is a city that is developing quite rapidly, so that it will have implications for the increase in space requirements caused by human resource activities. The phenomenon that occurs at this time is the existence of irregularities or discrepancies in the existing land use of the city spatial plan. This research is specialized in residential land use because since the adoption of the 2010-2030 RTRW, the biggest land use change has occurred in residential land use. This study aims to examine the implementation of the RTRW on residential land use in 2017, examine the distribution of deviations and determine the characteristics of deviant actors and analyze the factors that influence the occurrence of irregularities. The method used in this research is the field survey method by conducting interviews and questionnaires. The existing land use in 2017 is obtained from the interpretation of satellite imagery which is then carried out a field check. To find out the implementation of the RTRW on residential land use and the distribution of the deviation using GIS assistance with the overlay method, which is then carried out quantitative descriptive analysis and spatial approaches with spatial patterns. To find out the factors that influence the occurrence of irregularities in residential land use, interviews with the Salatiga City Spatial Planning Agency were used. Koesioner used to determine the characteristics of deviant perpetrators. Koesioner distribution is carried out at the location of the occurrence of irregularities by taking a random sample of 100 respondents. The results showed 1). implementation of the 2017 regional spatial plan the suitability level is 55.1%, settlements that deviate RTRW 4.2% and the remaining 40.7% are areas whose designation for settlements where existing ones have not yet been realized as settlements. In general, residential land use has not exceeded the area stipulated by the Salatiga City RTRW. 2). The spread of settlement deviations from spatial planning is spread throughout the district. The area of deviations in 2017 was 123.4 hectares or 4.2%. The most deviant designation area is the border area of the river. 3). The characteristics of the perpetrators of settlement deviations towards the Salatiga City Spatial Plan are: socio-economic conditions of the community in the location of irregularities showing low income levels with the type of work dominated by traders, unemployed and housewives, education and public knowledge of the Spatial Plan is still low so that it affects the occurrence of irregularities. 4). Factors that influence the occurrence of irregularities based on the results of interviews with the spatial agency that land use is still determined by the desires of respondents as land owners, lack of coordination with other institutions, less maximum in enforcing sanctions and less community participation in the implementation of RTRW.

Keywords: Implementation, Irregularities in Land Use, Settlements, Regional Spatial Planning

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan yang luar biasa di daerah perkotaan telah mengakibatkan tuntutan akan ruang yang luar biasa pula. Meningkatnya jumlah penduduk selalu dibarengi oleh meningkatnya tuntutan akan ruang untuk permukiman (Yunus, 2006). Bahwa perkembangan suatu perkotaan dengan laju pertumbuhan penduduk terus menerus akan menimbulkan peningkatan kebutuhan lahan. Keterbatasan ruang akibat dari jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan luas permukaan bumi yang semakin sempit akan menyebabkan perkembangan permukiman akan mencari alternatif lain salah satunya lahan yang belum dimanfaatkan. Perkembangan penggunaan lahan yang tidak terkendali cenderung akan terjadi pencaplokan wilayah yang peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang. Kota Salatiga merupakan kota yang strategis, berada pada jalur darat utama Jakarta- solo- semarang- Surabaya. Pusat-pusat pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah tinggi, akbid dan universitas mengakibatkan permintaan kebutuhan untuk permukiman meningkat sehingga alih fungsi lahan tidak bisa dihindarkan. Pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga pada tahun 2010-2017 mengalami kenaikan rata-rata 1,46% setiap tahun. Angka ini lebih besar dari pertumbuhan penduduk Jawa Tengah yaitu pada kisaran 0,78% pada periode yang sama. Menurut rekapitulasi data BPS kepadatan penduduk di Kota Salatiga mengalami perkembangan dari tahun ketahun, seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini



Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2010-2017
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Bertambahnya penduduk secara alami yang terus berlangsung, menjadi salah satu pendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan menyebabkan meningkatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah. Kondisi ini dipicu oleh pemahaman penduduk akan pemanfaatan ruang yang masih kurang. Seperti yang terjadi dikelurahan kauman kidul, dalam RTRW direncanakan sebagai taman kota tetapi pada kenyataannya dimanfaatkan sebagai permukiman. Dalam penelitian ini yang menjadi perhatian utama adalah penggunaan lahan permukiman karena sejak dilaksanakannya RTRW 2010-2030 perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi pada penggunaan lahan permukiman. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak negatif pada keberlangsungan kehidupan kawasan permukiman bagi masyarakat kota. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk menilai tingkat pencapaian RTRW terhadap permukiman Kota Salatiga. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 Pada Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017.”

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yang dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah semua

permukiman dan penduduk di Kota Salatiga. Sampel penelitian ini adalah penduduk yang berada di permukiman yang menyimpang rencana tata ruang wilayah. Sampel diambil dengan menggunakan metode *random sampling* sebanyak 100 responden.

2.1 Pengumpulan data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari interpretasi citra, observasi lapangan, koesioner di daerah penelitian, dan wawancara dengan instansi pemerintahan (dinas tata ruang dan kelurahan Kota Salatiga). Data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Teknik digitasi

Teknik ini digunakan untuk menghasilkan peta penggunaan lahan permukiman Kota Salatiga yang bersumber dari citra satellite tahun 2017.

2) Teknik observasi

Teknik ini digunakan untuk validasi hasil digitasi peta penggunaan lahan tahun 2017 sehingga mendapatkan gambaran mengenai daerah penelitian dan sekitarnya.

3) Teknik Koesioner

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer berupa karakteristik pelaku penyimpang rencana tata ruang wilayah Kota Salatiga yang meliputi karakter penghuni, karakter hunian dan pengetahuan penghuni tentang RTRW.

4) Teknik Wawancara

Teknik wawancara dilakukan untuk melakukan tanya jawab kepada dinas tata ruang dan petugas kelurahan untuk memperoleh informasi mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan penggunaan lahan permukiman.

2.2 Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan SIG dengan menggunakan metode *overlay* (tumpang-susun) yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif dan juga menggunakan pendekatan keruangan dengan pola keruangan. Metode *overlay* digunakan untuk mengetahui implementasi RTRW pada penggunaan lahan permukiman dan persebaran penyimpangannya. Data koesioner diolah dalam tabel

frekuensi dan dijadikan bentuk presentase yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif untuk menjelaskan karakteristik dari pelaku penyimpangan.

Data hasil wawancara dengan birokrasi tata ruang dan kelurahan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan diolah, dikelompokkan untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi rencana tata ruang wilayah pada penggunaan lahan permukiman tahun 2017

Kajian implementasi rencana tata ruang wilayah permukiman bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan permukiman terhadap RTRW di Kota Salatiga. Implementasi RTRW dikategorikan dalam 3 kelas yaitu kelas sesuai, belum sesuai dan tidak sesuai. Sesuai, apabila permukiman eksisting sesuai dengan arahan peta rencana tata ruang wilayah. Belum sesuai, apabila permukiman eksisting belum mengalami perubahan sesuai dengan RTRW. Tidak sesuai, apabila permukiman eksisting tidak sesuai dengan arahan peruntukan dalam peta rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

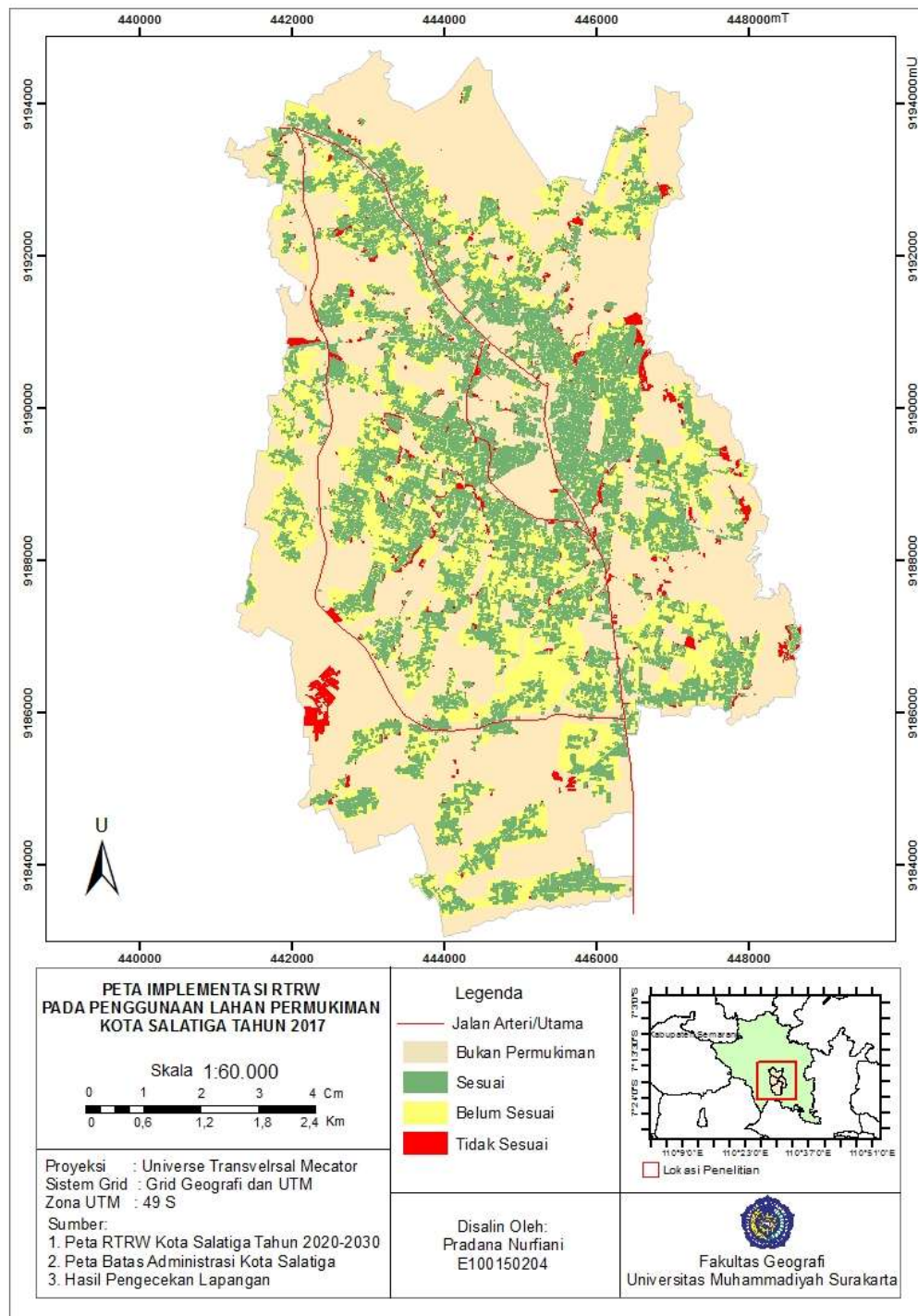
Gambaran mengenai pelaksanaan rencana tata ruang wilayah pada penggunaan lahan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Implementasi Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017

Kecamatan	Implementasi RTRW Tahun 2017					
	Sesuai		Belum Sesuai		Tidak Sesuai	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Argomulyo	535,8	18,0	478,2	16,1	42,6	1,4
Sidomukti	342,8	11,5	278,8	9,4	24,3	0,8
Sidorejo	418,2	14,1	268,8	9,0	28,5	1,0
Tingkir	341,2	11,5	184,3	6,2	28	0,9
Kota Salatiga	1638,0	55,1	1210,1	40,7	123,4	4,2

Sumber: Hasil Olahan, 2019

Implementasi RTRW pada tahun 2017 didominasi oleh kategori sesuai dengan luas 1638, Ha atau 55,1 %, kategori belum sesuai dengan luas 1210,2 Ha atau 40,7% dan kategori tidak sesuai dengan luas 123,4 Ha atau 4,2%. Kategori belum sesuai ini merupakan lahan yang oleh RTRW diperuntukkan untuk permukiman, tetapi eksistingnya belum terealisasi seluruhnya menjadi permukiman. Pada kelas ini sebenarnya seluruh kecamatan masih memiliki lahan yang peruntukannya untuk permukiman tetapi eksistingnya perkembangannya tidak pada lokasi peruntukan permukiman. Implementasi RTRW dengan kategori sesuai dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Argomulyo yaitu dengan luas 535,8 Ha atau 18,0%. Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan di Kota Salatiga dengan luas wilayah paling besar sehingga untuk kesesuaian penggunaan lahan permukiman paling mendominasi. Kategori kesesuaian terkecil berada di Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Sidomukti dengan presentase 11,5%. Kemudian kategori belum sesuai dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Argomulyo. Kategori ketidaksesuaian terbesar berada di Kecamatan Argomulyo dengan luas 42,6 Ha atau 1,4%, hal ini karena Kecamatan Argomulyo dalam RTRW diperuntukkan sebagai pengembangan kegiatan industri dan kegiatan berbasis pertanian meliputi agrowisata dan agroindustri. Sedangkan ketidaksesuaian terkecil dengan luas 24,3 Ha atau 0,8% berada di Kecamatan Sidomukti karena Kecamatan Sidomukti dalam RTRW diperuntukan sebagai kawasan permukiman. Terjadinya penyimpangan/ ketidaksesuaian RTRW berdasar hasil lapangan disebabkan karena tanah yg dimiliki masyarakat merupakan tanah milik pribadi yang merupakan warisan dari orang tua dan kurangnya pengetahuan masyarakat adanya rencana tata ruang wilayah. Berikut merupakan peta implementasi rencana tata ruang wilayah pada penggunaan lahan permukiman Kota Salatiga tahun 2017.



Gambar 2. Peta Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga Tahun 201

3.2 Persebaran Penyimpangan Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga

Penyimpangan penggunaan lahan merupakan perubahan satu bentuk penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya secara permanen berdasarkan pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting (Reny, 2017). Persebaran penyimpangan terhadap RTRW dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Luas Penyimpangan Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga Tahun 2017

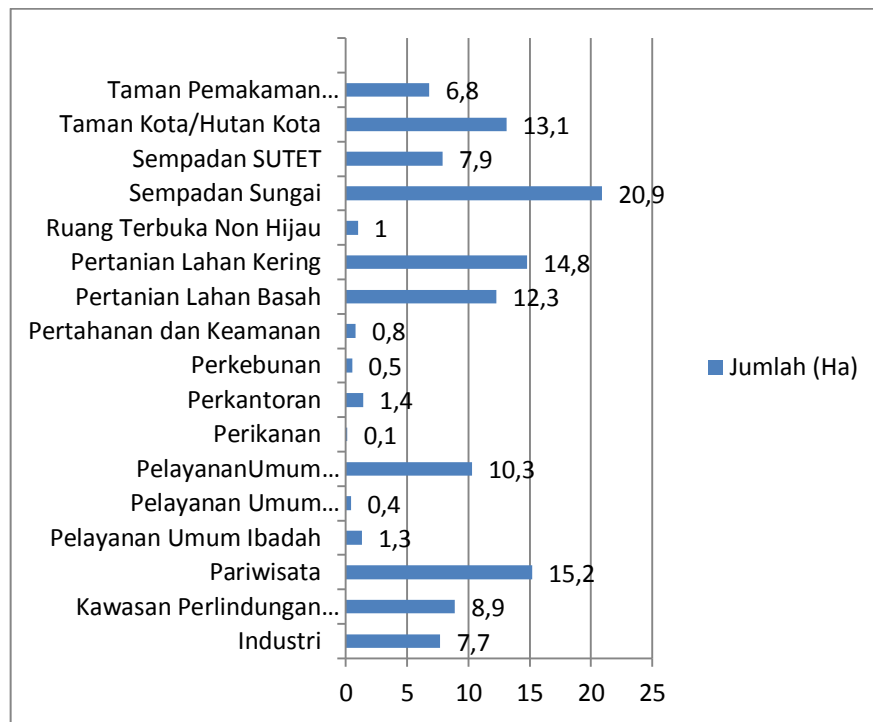
No	Kecamatan	Luas Wilayah PL Permukiman	Luas Penyimpangan	
		Ha	Ha	%
1	Argomulyo	1056,6	42,6	1,4
2	Sidomukti	645,9	24,3	0,8
3	Sidorejo	715,5	28,5	1,0
4	Tingkir	553,5	28,0	0,9
	Kota Salatiga	2971,5	123,4	4,2

Sumber: Penulis, 2019

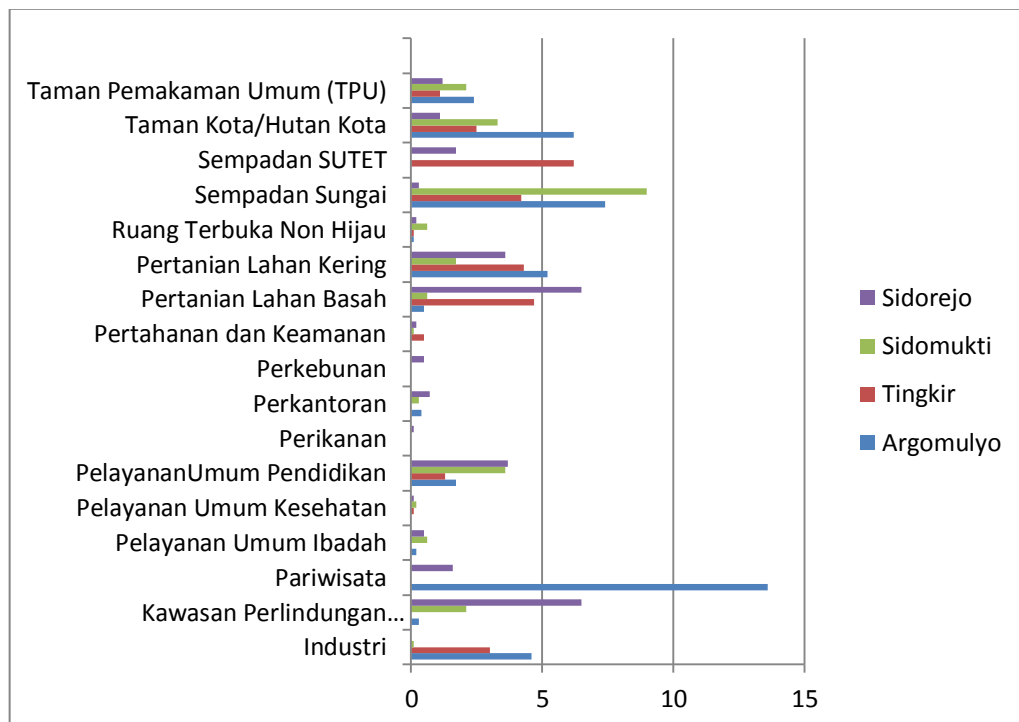
Tabel 2. menunjukkan luas penyimpangan penggunaan lahan permukiman terhadap RTRW tahun 2017. Penyimpangan penggunaan lahan permukiman terjadi diseluruh kecamatan. Lokasi penyimpangan diperoleh dari hasil overlay (tumpang susun) penggunaan lahan permukiman dengan RTRW tahun 2010-2030. Pada tahun 2017 penyimpangan terbesar di Kecamatan Argomulyo dengan luas 42,6 Ha atau 1,4% dan yang terkecil berada di Kecamatan Sidomukti dengan luas 24,3 Ha atau 0,8%. Berikut merupakan diagram jenis lahan yang tergantikan dan luas persebaran penyimpangan penggunaan lahan permukiman Kota Salatiga tahun 2017. Angka 4,2% di Kota Salatiga menunjukkan penyimpangannya kecil, jika dibandingkan dengan penyimpangan yang terjadi di Kota Magelang sebesar 31,61% dari total lahan 1812,276 Ha (dalam nugrahaeni, lilik, 2011). Berikut merupakan jenis dan luasan lahan yang tergantikan menjadi permukiman di Kota Salatiga tahun 2017.

Gambar 3. Jenis dan Luas Penyimpangan Penggunaan Lahan Permukiman

Kota Salatiga Tahun 2017



Gambar 4. Jenis dan Luas Penyimpangan Penggunaan Lahan Permukiman Per Kecamatan Kota Salatiga Tahun 2017



Berdasarkan gambar 3 dan 4, penyimpangan terbesar yang peruntukannya tergantikan menjadi permukiman terjadi pada kawasan sempadan sungai. Tahun 2017 penyimpangan terjadi disemua pemanfaatan lahan kecuali kawasan perdagangan dan jasa. Permukiman yang bearada di Kawasan perdagangan jasa tidak dikategorikan sebagai penyimpangan karena menurut dokumen rencana tata ruang wilayah pada ketentuan umum peraturan zonasi, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa diperbolehkan untuk kegiatan tempat tinggal.

Persebaran penyimpangan disetiap kecamatan berada pada lahan yang berbeda-beda. Di Kecamatan Argomulyo penyimpangan terbesar terjadi pada peruntukan lahan untuk pariwisata sebesar 15,2 Ha. Penyimpangan di Kecamatan Tingkir yang paling banyak terjadi pada lahan peruntukan sempadan SUTET. Kecamatan Sidomukti, lahan yang tergantikan terbesar adalah sempadan sungai. Penyimpangan terbesar di Kecamatan Sidorejo berada pada penggunaan lahan pertanian lahan basah. Kecamatan Sidorejo merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai pendidikan tinggi dan pariwisata. Keadaan tersebut membuat masyarakat melihat hal itu sebagai pasar sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan yang berimplikasi terjadinya penyimpangan RTRW karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap RTRW.

3.3 Analisis Karakteristik Penduduk Penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga

Untuk megetahui karakteristik pelaku penyimpangan penggunaan lahan permukiman digunakan koesioner. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *random sampling* dengan jumlah 100 responden. Karakteristik responden diukur menggunakan karakteristik sosial ekonomi dan pengetahuan mengenai RTRW. Perbandingan jenis kelamin antara responden laki-laki dan perempuan untuk pelaku penyimpangan permukiman di Kota Salatiga lebih banyak perempuan dengan presentase sebanyak 60%.

Dari jumlah keseluruhan responden sebagian Jumlah anggota keluarga berdasarkan hasil koesioner sebesar 78% memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 2. Kebanyakan dalam satu rumah masih di huni 2-3 kepala keluarga.

Dilihat dari asal tempat tinggal, jumlah pelaku penyimpang merupakan penduduk asli Kota Salatiga dan terdapat 23% merupakan penduduk pendatang.

Tingkat pendidikan responden cenderung tergolong dalam kategori rendah (SD). Tingkat pendidikan akan berpengaruh pada perilaku masyarakat. Terdapat sebagian masyarakat yang pendidikannya tergolong baik , tetapi tidak membuat masyarakat mengikuti aturan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat. Terlihat masyarakat tidak mengetahui bahwa telah menempati lokasi penyimpangan.

Tingkat pendapatan responden rata-rata masuk dalam kategori rendah. Pendapatan rendah memberikan indikasi bahwa masyarakat mengalami keterbatasan biaya sedangkan kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Status kepemilikan tanah dilokasi penyimpangan hampir seluruh responden merupakan tanah milik sendiri dan hasil dari tanah warisan orang tua. Sehingga tanah tersebut merupakan hak pribadi. Status tanah yang merupakan tanah warisan orangtua akan dengan mudah berpindah tangan/kepemilikan sehingga mendorong terjadinya penyimpangan penggunaan lahan.

Pengetahun masyarakat tentang RTRW masih rendah. Pengetahuan masyarakat yang rendah menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perencanaan apa yang hendak dilakukan dilokasi tempat tinggalnya. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan pemahaman penduduk mengenai tata ruang masih kurang, sehingga berdampak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam meaksanakan RTRW, bahkan banyak masyarakat tidak menyadari bahwa telah menempati tempat yang tidak sesuai dengan arahan RTRW.

3.4 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah pada Penggunaan Lahan Permukiman Kota Salatiga

Untuk mengetahui faktor terjadinya penyimpangan rencana tata ruang wilayah pada penggunaan lahan permukiman digunakan wawancara. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan rencana tata ruang adalah kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penataan tata ruang. Menurut pihak tata ruang, penyimpangan terjadi karena tidak adanya sinergitas antara dinas tata ruang dan dinas pertanahan dalam hal kepemilikan tanah. Pembangunan permukiman dilakukan swadaya oleh masyarakat sebagai pemilik tanah Sehingga pada saat penerapan dari RTRW terjadi benturan antara perda tata ruang dengan masyarakat dalam persoalan kepemilikan tanah. Hal tersebut yang menjadi kendala yang selalu dihadapi oleh dinas tata ruang. Terbatasnya SDM untuk melakukan pemantauan membuat sanksi yang diberikan masih kurang maksimal dan ditambah dengan kurangnya peran serta masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan RTRW menjadi andil terjadinya penyimpangan RTRW.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi rencana tata ruang pada penggunaan lahan permukiman Kota Salatiga tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah pada penggunaan lahan permukiman di Kota Salatiga tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan RTRW Kota Salatiga. Tingkat kesesuaian penggunaan lahan permukiman dengan RTRW seluas 1638 Ha atau 55,1% lahan sudah sesuai, seluas 1210,2 Ha atau 40,7% merupakan lahan yang belum sesuai atau lahan yang belum terlaksana dan sisanya sebanyak 123,4 Ha atau 4,2 % merupakan lahan yang tidak sesuai. Secara umum penggunaan lahan

permukiman di Kota Salatiga tahun 2017 belum melampaui batas yang telah ditetapkan dalam RTRW 2010-2030.

2. Penyimpangan penggunaan lahan permukiman tahun 2017 sebesar 123,4 Ha atau 4,2% dari luas wilayah seluruh permukiman Kota Salatiga. Terdapat 17 jenis penggunaan lahan yang tergantikan oleh permukiman dan lahan tergantikan yang paling dominasi adalah sempadan sungai. Kecenderungan penyimpangan terjadi di Kecamatan Argomulyo.
3. Karakteristik pelaku penyimpangan rencana tata ruang wilayah memiliki pengetahuan tentang tata ruang yang masih rendah, tingkat pendidikan lulusan SD, pendapatan masuk dalam kategori rendah dengan jenis pekerjaan dominasi sebagai ibu rumah tangga dan pengangguran. Kepemilikan tanah merupakan lahan milik sendiri atau warisan orangtua dengan status kependudukan penduduk asli Kota Salatiga.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan / ketidaksesuaian permukiman adalah:
 - a. Kepemilikan tanah milik privat
 - b. Kurangnya koordinasi dengan lembaga lain
 - c. Kurang maksimal dalam penegakan sanksi
 - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan RTRW.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi Pemerintah Kota

1. Kegiatan sosialisasi pada masyarakat, pengusaha, pengembang mengenai rencana tata ruang wilayah dilakukan secara rutin dan juga digiatkan kembali saat hadirnya kepemimpinan wilayah baru yang terpilih.
2. Pemerintah harus melakukan penanganan dan pengendalian terhadap permukiman yang telah menyimpang rencana tata ruang wilayah melalui surat pemberian ijin mendirikan bangunan yang lebih diperketat dan mempertegas sanksi terhadap permukiman yang menyimpang sesuai dengan undang-undang No.26 Tahun 2007.

3. Evaluasi pemerintah terhadap permukiman di Kota Salatiga yang dapat dilakukan pemetaan di lapangan secara periodik agar permukiman dimasa yang akan datang lebih banyak yang sesuai dengan RTRW sehingga perencanaan pembangunan berkelanjutan tidak terganggu.

4.2.2 Bagi Masyarakat Penyimpang Permukiman

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai RTRW.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan RTRW, yang dapat dilakukan dengan turut mengawasi dan melaporkan kepada dinas tata ruang apabila terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang .

4.2.3 Bagi Pembaca

1. Bagi para pembaca skripsi ini agar mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan RDTR agar lebih detail dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, Kota Salatiga dalam angka . Kota Salatiga: BPS
- Khaerani, reny. (2017). Analisis penggunaan lahan dan arahan penyempurnaan rencana tata ruang wilayah kabupaten Sumedang. (Tesis). Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Nugrahaeni, Lilik. (2011). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Magelang Tahun 2011 Menggunakan Sistem Informasi Geografis. (Skripsi). Yogyakarta :Universitas Negeri Yogyakarta.
- Yunus , Hadi Sabari. (2006). *Megapolitan Konsep, Problematika dan Prospek*. Yogyakarta : Pustaka Belajar